



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta supervisi aktivitas keuangan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan mencapai efisiensi serta efektivitas penggunaan asal daya keuangan. Manajemen keuangan bekerjasama dengan pengelolaan arus kas, investasi dan pembiayaan buat mencapai tujuan jangka pendek serta jangka panjang perusahaan. (Mataris et al., 2022).

Semua aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi, pembiayaan, dan pengelolaan aset untuk banyak sekali tujuan dianggap menjadi manajemen keuangan. (Fauzan & Defitri Rusdiyanti, 2022).

Secara umum, manajemen keuangan ialah proses krusial dalam mengelola asal daya keuangan organisasi atau perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan ialah untuk mengoptimalkan penggunaan dana buat mencapai tujuan jangka panjang, mempertinggi nilai perusahaan serta menjaga likuiditas yang baik. Manajemen keuangan yang baik melibatkan pengendalian arus kas, pengambilan keputusan investasi strategis dan pengelolaan asal daya secara efektif dan efisien.

##### 2.1.2 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan



Laporan Keuangan adalah laporan yang akan terjadi asal sekian banyak transaksi yang terjadi didalam sebuah perusahaan, transaksi-transaksi tadi di golongkan, di catat, dan di ringkas secara sempurna dalam bentuk satuan uang lalu dilakukan penafsiran buat aneka macam tujuan (Putri et al., 2024).

Laporan keuangan adalah gosip yg menggambarkan syarat keuangan suatu perusahaan serta selanjutnya info ini dapat dipergunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan (Siti Karmila & Muhammad Fauzan, 2023).

Jadi mampu dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yg menyajikan data keuangan suatu perusahaan atau organisasi di periode eksklusif. Laporan keuangan umumnya dibuat oleh perusahaan atau organisasi buat menyampaikan ilustrasi pada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditur dan pihak terkait lainnya tentang kinerja keuangan mereka. kondisi saat ini artinya syarat keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu (neraca) dan pada periode eksklusif (laporan laporan untung rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang telah direalisasikan di periode tertentu. terdapat banyak jenis laporan keuangan, yang dapat disesuaikan menggunakan kebutuhan usaha. Berikut lima jenis laporan keuangan menurut panduan baku Akuntansi Keuangan (PSAK):

a. Laporan Neraca

Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang paling umum disiapkan oleh akuntan untuk perusahaan. Neraca artinya laporan yang menyampaikan posisi keuangan suatu perusahaan di suatu titik saat tertentu serta meliputi posisi jumlah dan jenis kegiatan dan kewajiban serta ekuitas



perusahaan. Neraca umumnya disusun di dua bentuk, yaitu bentuk T serta bentuk L. Fungsi dari neraca ialah sebagai penyedia data keuangan yang akan dipergunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. tidak hanya itu, laporan neraca juga digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. pengembalian perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi digunakan untuk mendeskripsikan yang akan terjadi usaha suatu perusahaan di periode tertentu. Laporan ini berisi aneka macam data, seperti jumlah pendapatan, sumber pendapatan, jumlah biaya, dan sifat biaya. Laporan laba rugi juga dipergunakan buat menunjukkan profitabilitas dan kinerja ekonomi suatu perusahaan. umumnya, dua model digunakan untuk menyajikan laporan laba rugi. model satu tingkat hanya memakai pemisahan antara laba dan rugi, tanpa pengelompokan pendapatan dan biaya. model multi-level memakai pengelompokan pendapatan dan biaya, serta laporannya kemudian disusun dalam urutan tertentu.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Laporan keuangan ini pula berisi perubahan modal serta sebab yang menyertainya. juga dikenal sebagai laporan perubahan ekuitas untuk kepemilikan perseorangan, laporan perubahan modal berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan di saat itu dan alasan perubahan modal.

d. Laporan Arus Kas



Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang paling umum disiapkan oleh akuntan untuk perusahaan. Neraca artinya laporan yang menyampaikan posisi keuangan suatu perusahaan di suatu titik saat tertentu serta meliputi posisi jumlah dan jenis kegiatan dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Neraca umumnya disusun di dua bentuk, yaitu bentuk T serta bentuk L. Fungsi dari neraca ialah sebagai penyedia data keuangan yang akan dipergunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. tidak hanya itu, laporan neraca juga digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan.

- 1) Operating: berisi seluruh kegiatan dan transaksi yang tidak termasuk dalam pembiayaan perusahaan maupun kegiatan investasi. Arus ini biasanya berasal dari kegiatan operasional seperti kegiatan produksi, distribusi dan juga penyediaan jasa.
- 2) Investing: berisi berbagai hal berkaitan dengan aktivitas investasi, mulai dari pembelian dan penagihan hutang, pembayaran pinjaman, kekayaan perusahaan dan masih banyak lagi.
- 3) Financing: berisi aktivitas pendanaan dan pembiayaan, seperti perolehan sumber daya dari pihak lain, peminjaman, dan pembayaran kembali hutang.

e. Laporan CaLK

Laporan CaLK merupakan singkatan dari Catatan atas Laporan Keuangan. Format laporan keuangan jenis ini artinya menyampaikan isu mengenai penjelasan yang diklaim perlu sehingga menjadi lebih kentara. Tujuan laporan



CaLK adalah untuk memudahkan pengguna dalam tahu isi asal laporan keuangan tersebut.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan yaitu:

- Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dan juga kewajiban dan modal yang ada diperusahaan
- Memberikan informasi tentang pendapatan yang ada diperusahaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
- Memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, modal perusahaan
- Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan
- Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan

Unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang diwajibkan oleh hukum untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan tahunan adalah entitas akuntansi yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban, menyelenggarakan akuntansi, dan menyajikan laporan keuangan sesuai catatan akuntansinya yang bertujuan umum yang terdiri dari :

- Pemerintah pusat
  - Pemerintah daerah
  - Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
  - Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lain.
- ## 3. Karakteristik Laporan Keuangan





Karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antaralain:

- a. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
- b. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
- c. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
- d. Informasinya harus memiliki sifat daya banding.

### 2.1.3 Analisis Laporan Keuangan

#### 1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menganalisis laporan keuangan adalah suatu proses dimana data (informasi) dalam laporan keuangan diuraikan menjadi komponen-komponen individual, masing-masing komponen ditelaah dan hubungan antar komponen tersebut diselidiki dengan menggunakan teknik analisis tertentu dalam rangka memperoleh pemahaman yang akurat dan gambaran yang komprehensif atas informasi tersebut.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu adalah dengan menganalisis laporan keuangan tahunannya (Iqtishaduna & Kita, 2014). Laporan keuangan harus dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat tercermin dari penilaian kinerja keuangan daerah (Vebiani & Hardiana, 2022).

#### 2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan



Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonfirmasi apa yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh analisis yang dilakukan. Jika analisis lebih lanjut difokuskan pada tujuan-tujuan ini, ada batasan dan hasil yang harus dicapai.

#### 2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari kata bahasa Inggris “leistung”. Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas yang dapat diukur dari suatu entitas, selama itu merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan dalam melaksanakan otonomi. (Efektivitas & Melmambessy, 2022).

Kinerja dalam organisasi merupakan respon terhadap keberhasilan atau kegagalan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja hanya dapat ditentukan jika individu atau sekelompok orang memiliki kriteria keberhasilan tertentu berupa tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Tanpa tujuan, sulit untuk mengetahui kinerja individu atau organisasi, karena tidak ada ukuran untuk membandingkannya (Mahsun, 2011:141).

Tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas tertentu dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi perusahaan disebut sebagai kinerja (Fauzan, 2019). Secara umum, kinerja adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya (Kharuddin & Mofika, 2019).

Kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah disebut sebagai kemampuan keuangan daerah (Tulung, 2017)



Menurut Bastian (2001), kinerja adalah tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic plan) organisasi atau kegiatan atau program. Sumarjo (2010) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai "keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah. Bentuk kinerja ini dapat menunjukkan rasio-rasio keuangan yang dibentuk dari unsur-unsur laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu daerah berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, yang ditetapkan melalui kebijakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil di bidang keuangan daerah berdasarkan serangkaian indikator keuangan.

(Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S, 2020), merumuskan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.





3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

Sementara itu, Mardiasmo, 2002 dalam Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira

Mariana S, 2020 menyatakan adanya indikator Kinerja Keuangan Daerah yang rumusannya meliputi:

1. Indikator input, yaitu segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil. Contohnya termasuk jumlah sumber daya yang dibutuhkan, jumlah staf atau karyawan yang dibutuhkan, infrastruktur yang tersedia dan waktu yang dibutuhkan.
2. Indikator Proses (Process), yaitu merumuskan atau menggambarkan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan produksi, ketepatan waktu maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya ketaatan pada peraturan perundangundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan produk atau jasa.
3. Indikator Keluaran (Output), yaitu sesuatu yang diharapkan secara langsung dapat dicapai dari adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan dan dijalankan supaya dapat keluaran yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang diproduksi serta dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
4. Indikator Hasil (Outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya:



tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas kinerja para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (Benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan keuntungan dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi dari masyarakat.
6. Indikator Dampak (Impact), yaitu pengaruh yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### 2.1.5 Rasio Keuangan Daerah

#### 1. Pengertian Rasio Keuangan Daerah

Darmansyah (2013) menjelaskan bahwa rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dari sudut pandang keuangan, dengan membandingkan berbagai bagian dari laporan keuangan daerah, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tujuan dari rasio-rasio tersebut adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Analisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah (Susanto, 2019)

Rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan daerah dengan membandingkan angka-angka tertentu dalam laporan keuangan



daerah seperti pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Metrik ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan daerah (Digdowiseiso & Alfian, 2023).

Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya untuk menentukan posisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja manajemen selama periode tertentu.

## 2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan Daerah

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (Halim, 2007) yang meliputi:

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Faud (2016: 138), angka kemandirian menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan eksternal. Semakin tinggi angka kemandirian, semakin rendah ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Angka kemandirian juga menunjukkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi angka kemandirian, semakin rendah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$



Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007).



### c. Rasio Efisiensi

Efisiensi pengelolaan anggaran daerah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efisien suatu kegiatan dilaksanakan dengan membandingkan antara output dan input. Rumusan efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara realisasi belanja daerah (pengeluaran) dengan total anggaran belanja daerah, semakin kecil rasio ini, semakin efisien kegiatan tersebut, dan sebaliknya.

Mahmudi (2011) berpendapat bahwa mengevaluasi efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Penghitungan rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Jika kinerja keuangan lebih dari 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

### d. Rasio Aktivitas (Keserasiaan Belanja Daerah)

Keserasian Belanja Daerah merupakan indikator keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan secara optimal distribusi dananya antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Rasio keserasian belanja terdiri dari dua faktor, yaitu: a) rasio belanja rutin terhadap PAD dan b) rasio belanja pembangunan terhadap PAD. Kedua rasio di atas sebagai berikut:

### e. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD





Rasio belanja rutin terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 tahun periode anggaran. Kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Halim (2007), Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas, semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, atau sebaliknya, maka semakin besar pula belanja rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode anggaran. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar rasio antara belanja rutin dan total ODA,

f. Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Rasio keuangan daerah, yang dikenal sebagai rasio pengeluaran pembangunan terhadap ODA, menggambarkan pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui dana ODA. Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan persamaan :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas, semakin tinggi rasio belanja pembangunan terhadap total ODA pada tahun tertentu dalam periode anggaran, semakin banyak yang dibelanjakan pemerintah daerah untuk pembangunan, atau sebaliknya.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Semakin tinggi porsi belanja pembangunan dalam ODA, maka semakin banyak dana yang disediakan pemerintah daerah dari ODA untuk merealisasikan investasi dalam bentuk barang dan jasa yang melayani kepentingan publik.

### 2.1.6 Standar Penilaian Rasio Keuangan Daerah

Masing-masing rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan sudah pasti ada standarnya. Berikut standar penilaian rasio keuangan daerah:

#### 1. Rasio Efisiensi

**Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efisiensi**

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| 100% Keatas                 | Tidak Efisien  |
| >90% - 100%                 | Kurang Efisien |
| >80% - 90%                  | Cukup Efisien  |
| ≥60% - 80%                  | Efisien        |
| Dibawah dari 60%            | Sangat Efisien |

Sumber : Depdagri. Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yangtelah digariskan dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangannya antara 60% - 80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangannya berada diatas 100%.

#### 2. Rasio Efektifitas

**Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektifitas**

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| 100% Keatas                 | Sangat Efektif |
| >90% - 100%                 | Efektif        |
| >80% - 90%                  | Cukup Efektif  |
| ≥60% - 80%                  | Kurang Efektif |
| Dibawah dari 60%            | Tidak Efektif  |



Sumber : Depdagri. Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efektif jika persentase kinerja keuangannya antara >90% - 100%. Sebaliknya dikatakan tidak efektif jika persentase kinerja keuangannya berada dibawah dari 60%.

### 3. Rasio Kemandirian

**Tabel 2.3 Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah**

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rendah Sekali      | 0-25            | Instruktif    |
| Rendah             | 25-50           | Konsultatif   |
| Sedang             | 50-75           | Partisipatif  |
| Tinggi             | 75-100          | Delegatif     |

Sumber : Halim (2007)

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian :

- Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.



- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan telah ada penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh:

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti/Tahun     | Judul dan Lembaga Penerbit  | Variabel Penelitian dan Alat Analisis  | Hasil Singkat Penelitian  |
|----|-------------------------|---|--|---|
| 1. | Dani Melmambessy (2022) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (STIE) | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis rasio | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura pada tahun 2017-2019 masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan rasio ketergantungan rata-rata mencapai 83,10%. Rasio kemandirian keuangan daerah berada pada angka sedang (23,14%), dan rasio desentralisasi fiskal yang rendah (16,82%) menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri dalam menyelenggarakan desentralisasi. Namun, meskipun |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
  3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Universitas Islam Indragiri**

| No | Nama Peneliti/Tahun           | Judul dan Lembaga Penerbit  | Variabel Penelitian dan Alat Analisis  | Hasil Singkat Penelitian  |
|----|-------------------------------|---|--|---|
|    |                               |   |  | demikian, rasio efektivitas PAD Kota Jayapura tergolong sangat tinggi (103,35%), menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang sangat baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan.  |
| 2. | Oesi Agustina Albasiah (2012) | Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), Jurnal Ilmiah, FEB | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis rasio | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Malang pada tahun 2007-2011 masih rendah dengan rata-rata 18,76%, menunjukkan kemandirian yang instruktif. Rasio efektivitas mencapai 105%, yang berarti sangat efektif. Rasio efisiensi tercatat efisien dengan rata-rata 4,89%. Selain itu, belanja rutin lebih dominan dibandingkan belanja pembangunan, dengan rasio belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8%, sementara belanja pembangunan hanya 22,2%. Rasio pertumbuhan PAD, |





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| No | Nama Peneliti/Tahun                             | Judul dan Lembaga Penerbit  | Variabel Penelitian dan Alat Analisis  | Hasil Singkat Penelitian   |
|----|---|---|--|--|
|    |   |   |  | pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan masing-masing menunjukkan angka yang bervariasi, dengan PAD tumbuh sebesar 26,58%.  |
| 3. | Syahputra Silalahi (2023)                       | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Tahun 2020-2022, Tesis.                               | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis rasio | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh pada tahun 2020-2022 berada dalam kategori yang sangat baik, dengan rasio efektivitas 92,12% (efektif), efisiensi 98,47% (efisien), kemandirian desa 107,50% (mandiri), dan rasio ekonomis 98,81% (ekonomis). Hal ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam pengelolaan sumber daya desa |
| 4  | Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnarningsih, 2022 | Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Jurnal Ilmiah | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis rasio | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.   |



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

| No | Nama Peneliti/Tahun   | Judul dan Lembaga Penerbit   | Variabel Penelitian dan Alat Analisis  | Hasil Singkat Penelitian  |
|----|---|--|--|---|
|    |   | Universitas Batanghari Jambi   |  | Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, optimalnya perolehan pendapatan asli daerah, serta pengelolaan belanja yang efisien, maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut  |
| 5. | La Ode Abdul Wahab, Siti Rofingaton, dan Balthazar Kreuta, 2017 | Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jurnal Keuda | Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis rasio | Hasil dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Jayapura memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010-2014, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah, yakni hanya 5,11%. Selain itu, efektivitas PAD di Kabupaten Jayapura tergolong sangat efektif dengan rata-rata 116,09% dalam lima tahun terakhir. Meskipun efisiensi pemungutan PAD sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
  3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

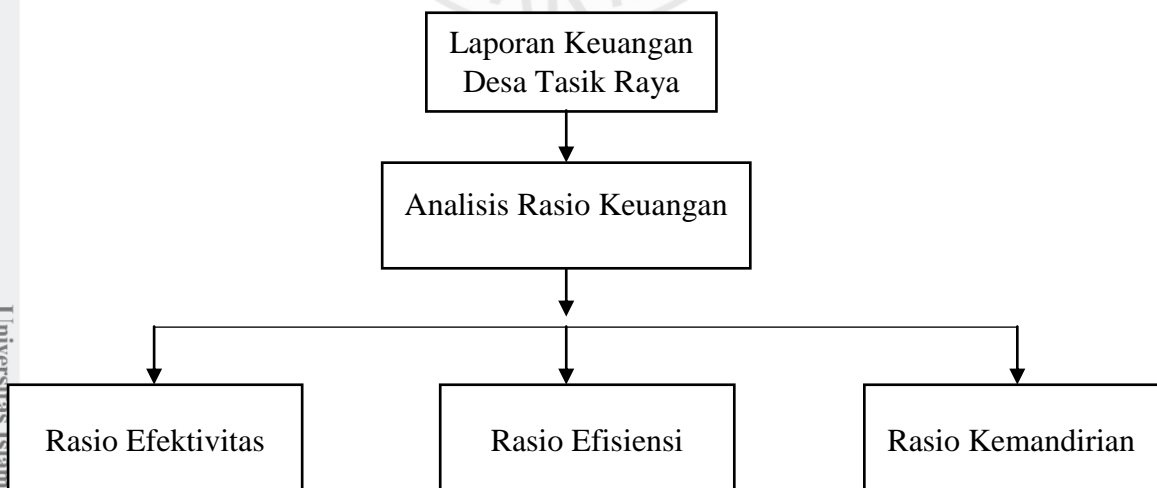
Universitas Islam Indragiri

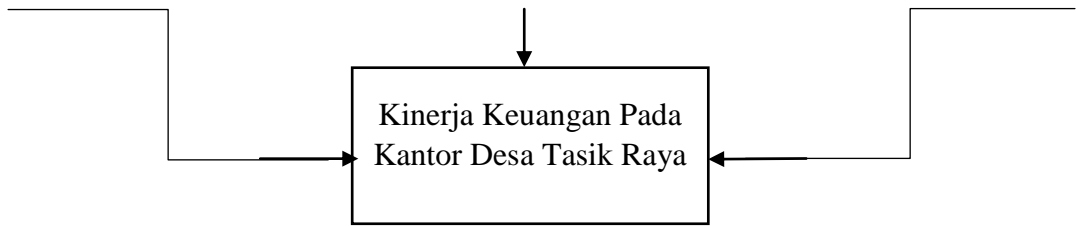
| No | Nama Peneliti/Tahun | Judul dan Lembaga Penerbit | Variabel Penelitian dan Alat Analisis | Hasil Singkat Penelitian  |
|----|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|    |                     |                            |                                       | daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih maksimal. |

Sumber : Diolah peneliti, 2024

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut : “Diduga Kinerja Keuangan Daerah pada Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 berdasarkan Rasio Efisiensi, Efektivitas, dan kemandirian dalam keadaan baik.

## 2.5 Variabel Penelitian

1. Konsep Operasional Variabel

**Tabel 2.5 Variabel Penelitian**

| Variabel                | Definisi   | Indikator                                      | Pengukuran       |
|-------------------------|--|--|------------------|
| 1. Kinerja Keuangan (Y) | Menurut Hery (2019:13) Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk menevaluasi efisiensi dan kemandirian perusahaan/instansi | Kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas | Rasio likuiditas |



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| Variabel                  | Definisi   | Indikator                    | Pengukuran  |
|---------------------------|--|------------------------------|---|
|                           | dalam menghasilkan laba dan posisis kas tertentu   |                              |   |
| 2. Rasio Efisiensi (X1)   | Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan   | Rasio pendapatan asli daerah | Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$                               |
| 3. Rasio Efektifitas (X2) | (Halim, 2012) Rasio Efektifitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah untuk mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri.    | Rasio Pendapatan Asli Daerah | Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Belanja/Anggaran Pendapatan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$               |
| 4. Rasio Kemandirian (X3) | Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233) | Rasio pendapatan asli daerah | Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan asli daerah/pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ |

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

2. Indikator Penelitian
  - a. Indikator Efisiensi





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang ada (anggaran, waktu, tenaga) digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah.

b. Indikator Efektifitas

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dari pengelolaan keuangan daerah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

c. Indikator Kemandirian

Kemandirian keuangan desa menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari luar.